

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Perubahan tahun 2022 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2018–2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut, juga dengan memperhatikan ketersediaan dana Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Pelaihari, Juli 2022


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,
Andris Eyo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1.1

 1.1 Latar Belakang 1.1

 1.2 Landasan Hukum 1.2

 1.3 Maksud dan Tujuan 1.6

 1.4 Sistematika Penulisan 1.6

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.1

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.14

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.15

 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.16

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 3.1

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Propinsi 3.1

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2

 3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 3.4

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4.1

BAB V Penutup 5.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Perubahan, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD Perubahan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Perubahan. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Perubahan yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD murni. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Perubahan.

Rancangan Renja Perubahan SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD berdasarkan kepada ketersediaan dana Pemerintah Daerah. Renja Perubahan SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja Perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

30. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) adalah sebagai berikut:

- Memberikan acuan bagi SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Bappeda;
- Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang dalam penyusunan RKA SKPD Bappeda;
- Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja Perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

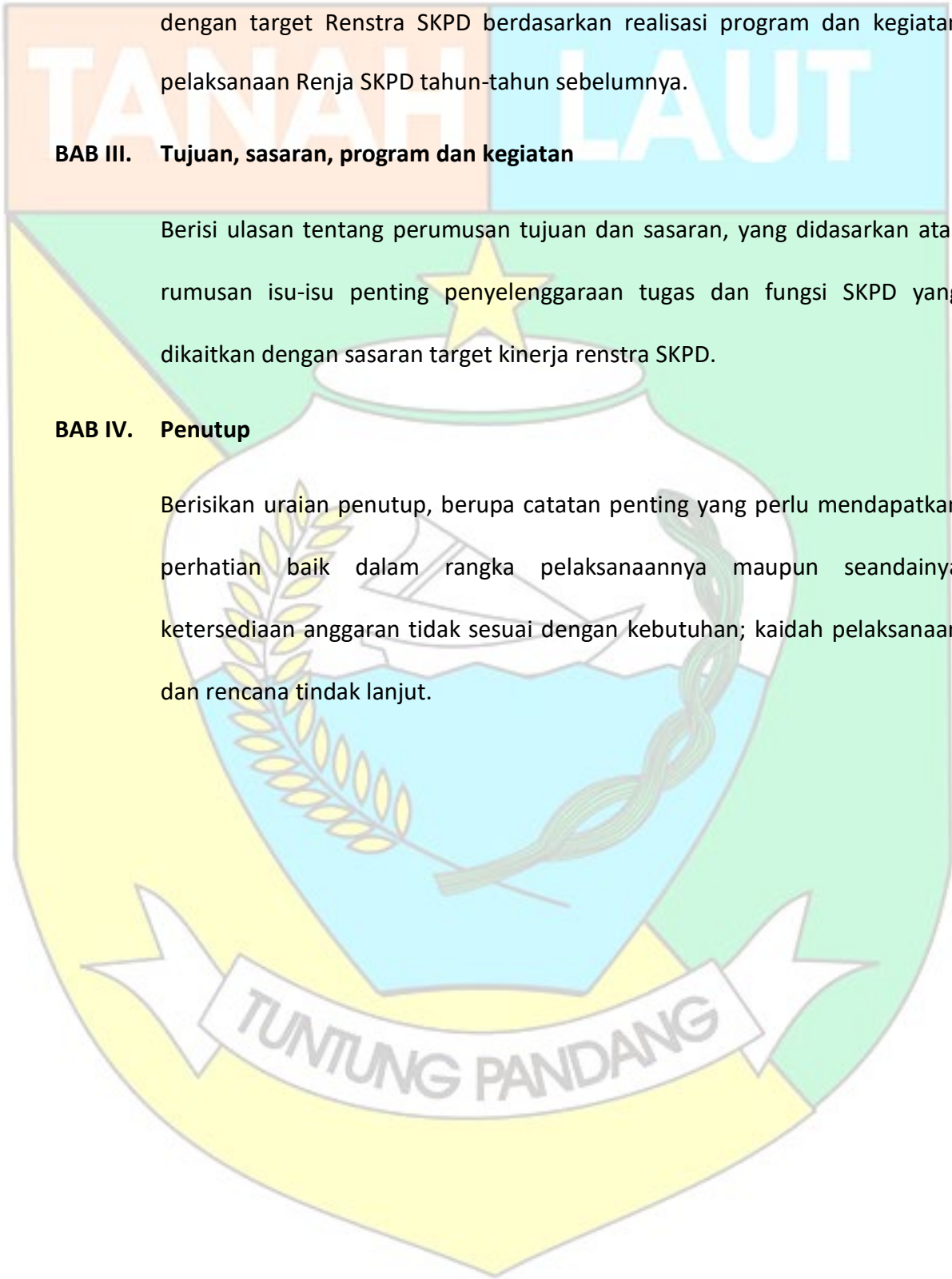
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada saat disusunnya Renja Perubahan Bappeda Tahun 2022 ini, dalam konteks melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja ini juga dapat melihat pada realisasi sampai dengan akhir tahun 2021. Hal yang menjadi esensinya sejauh mana capaian sampai dengan tahun 2021 dan target apa yang akan dicapai pada tahun 2022, sehingga dapat direncanakan program/kegiatan untuk tahun 2022 dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, disamping ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

Hasil kegiatan Bappeda Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan yang secara fisik dapat mencapai sebesar 95,80%. Hal ini dikarenakan terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2022 diuraikan pada tabel tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021. Sedangkan secara singkat beberapa hasil kegiatan utama tahun 2021 dan realisasi tahun 2022 sampai dengan bulan Juni dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara lebih rinci Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi ;
- d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan perencanaan tata ruang ;
- e. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan serta pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah ;
- g. dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.

Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.
4. Disiplin aparatur yang belum optimal.
5. Penyediaan dan penggunaan data-data statistik dan hasil penelitian lainnya yang kurang optimal dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda merupakan SKPD yang mengkoordinir kegiatan perencanaan lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Usulan kegiatan hasil musrenbang desa yang kemudian dilanjutkan dalam musrenbang kecamatan akan diteruskan ke SKPD dalam rangka penyempurnaan Rancangan Renja Perubahan SKPD. Fungsi Bappeda

adalah mengawal prioritas hasil musrenbang RKPD di Kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 agar dimasukkan dalam Rancangan Renja Perubahan SKPD dan menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022. Dengan demikian untuk usulan langsung dari masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Bappeda adalah terkait dengan perlunya dilakukan inovasi dan improvisasi agar kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan dapat lebih optimal hasilnya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2022 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Perubahan Bappeda Tahun 2022 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja Perubahan 2022
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.	1. Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Bencana	1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataaan	2. Mengembangkann Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Program perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Penguatan Reformasi Birokrasi	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		4. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja Perubahan 2022
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.		



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Tanah Laut sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, adalah Misi ketiga yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam hal ini Bappeda merupakan SKPD yang mendukung dalam peningkatan sistem pelayanan kegiatan perencanaan dan mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan.

Tabel 3.3.
Sasaran Bappeda Tanah Laut Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD	61,5	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	90	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.	Peningkatan kualitas perencana pembangunan daerah.	
	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan			Persentase program yang memenuhi target	90	Meningkatkan Pengendalian evaluasi Kinerja SKPD lingkup Kabupaten.	Peningkatan koordinasi dengan SKPD se Kabupaten.	
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90	Meningkatk an kualitas perencanaa n SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.	
				Persentase Meningkatn ya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90			

				Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	90		
				Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.
				Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPD	90		
				Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	90	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	90	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	90	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian,	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan

				Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	90	Perencanaan, pelaporan dan keuangan SKPD	administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan SKPD
				Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	90		

Sesuai dengan tupoksinya Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pembinaan UPT Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber

daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan penelitian dan pengembangan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Nasional;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Nasional;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah;
- e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial dan sumber daya alam ;
- g. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang formasi dan pengadaan aparatur;
- i. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penjurangan karier dan fasilitasi profesi aparatur;
- j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Penyediaan Bahan/Material
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Dari pelaksanaan 4 (empat) program tersebut di atas kebutuhan dana indikatif adalah sebesar Rp. 8.173.918.732,- (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Adapun secara rinci terkait dengan penjelasan dari setiap program berupa output dan outcome kegiatan dapat dilihat pada matrik Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan SKPD Bappeda Tahun 2022 (terlampir).

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6 Dokumen
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5 Dokumen
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan	12 Bulan
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Dokumen
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi urusan Umum dan Kepegawaian	100 %
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	50 ASN
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	11 Jenis
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah jenis	71 Jenis

	Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	6 Jenis
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	1 Jenis
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pameran	2 Event
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Perjalanan Dinas	561 Kali
		Jumlah Rapat	200 Kali
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
1.5.1	Pengadaan Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya	9 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang dibayarkan	3 Jenis
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PTT yang dibayarkan honoranya	14 orang
		Jumlah jenis alat kebersihan	24 Jenis
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %

		Urusan Pemerintahan Daerah	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 Unit
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara	10 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	6 Unit
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	6 Jenis
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bangunan yang dipelihara / direhabilitasi	2 Bangunan
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85 %
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	100 %
2.1.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	1 Dokumen
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja	1 Dokumen
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan	100 %

		Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK	4 Dokumen
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85 %
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	4 Laporan
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan	1 Dokumen
3.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup	4 Laporan

		Sub Bidang Sumber Daya Manusia	
3.1.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	1 Laporan
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMDdan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil FGD Analisa Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	5 Laporan
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindag kop	1 Laporan

3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitas Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Laporan
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA)	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha ,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	5 Laporan
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	1 laporan
3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang	1 Laporan

		Pengembangan Wilayah	
3.3.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 laporan
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang di tindaklanjuti	75 %
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya tindak lanjut	100 %
4.1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian	1 Dokumen
4.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kajian Bidang Inovasi dan Teknologi	100 %
4.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen	0 Dokumen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Bappeda.

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2022.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ketiga RPJMD yaitu “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Pagu indikatif yang terdapat dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut disusun dengan memperhatikan ketersediaan dana Daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Kepala Bappeda



ANDRIS EYONY, S.STP, M.Si
NIP.19790928 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 26 Tahun 2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut;
- b. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka diperlukan penyusunan rencana tahunan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
21. Peraturan Daerah Tanah Laut nomor 02 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut tentang tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda Tahun 2022.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Bappeda Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari.
Pada Tanggal : Juli 2021


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,
Andris Evert, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19790928 199711 1 001

LAPORAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN MARET TAHUN 2022

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.028.919.744	1.318.289.928	16,42	5,91
5.01	PERENCANAAN				7.893.014.256	1.318.289.928	16,70	11,81
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75 nilai		7.098.960.974	1.228.199.768	17,30	11,69
5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%		9.999.501	1.125.000	11,25	12,50
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6 dokumen	2 dokumen	4.999.501	1.125.000	22,50	25,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5 dokumen	0 dokumen	5.000.000	-	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		5.809.154.465	1.037.677.137	17,86	22,50
5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan	12 bulan	4 bulan	5.799.156.390	1.037.327.137	17,89	25,00
5.01.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Dokumen	1 dokumen	9.998.075	350.000	3,50	20,00
5.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%		15.000.000	-	0,00	0,00
5.01.01.2.05.11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 ASN	-	15.000.000	-	0,00	0,00

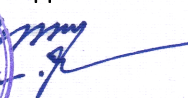
Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%		622.061.246	66.539.378	10,70	11,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	11 jenis	1 jenis	9.655.959	888.000	9,20	10,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	70 jenis	10 jenis	119.434.449	17.803.100	14,91	15,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	6 jenis	2 jenis	54.500.838	6.780.800	12,44	15,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	3.480.000	60.000	1,72	10,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(1) jumlah Perjalanan Dinas, (2) Jumlah Rapat	(1) 100 Kali (2) 200 Kali	10 kali 20 kali	434.990.000	41.007.478	9,43	5,00
5.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		66.524.698	-	0,00	0,00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya	4 unit	0 unit	66.524.698	-	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		471.277.417	108.104.253	22,94	27,50
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	4 jenis	3 jenis	120.352.500	21.296.214	17,69	30,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	(1) jumlah jenis alat kebersihan, (2) jumlah PTT yang dibayarkan honor nya	(1) 24 jenis, (2) 14 Orang	5 jenis 14 orang	350.924.917	86.808.039	24,74	25,00

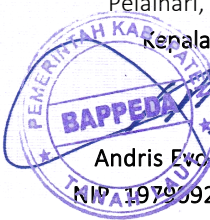
Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		104.943.647	14.754.000	14,06	8,33
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	11.998.152	1.840.000	15,34	10,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	(1) Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (2) Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	(1) 10 Unit (2) 6 Unit	1 unit 6 unit	68.195.495	7.651.500	11,22	10,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	5 Jenis	1 jenis	24.750.000	5.262.500	21,26	5,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85%		677.911.641	87.915.160	12,97	15,00
5.01.02.2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	100%		495.391.641	77.915.160	15,73	35,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	(1) Jumlah Dokumen RKPD, (2) Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	(1) 1 dokumen, (2) 1 dokumen	-	495.391.641	77.915.160	15,73	35,00
5.01.02.2.02	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		100.000.000	-	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja	1 dokumen		100.000.000	-	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		82.520.000	10.000.000	12,12	10,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.02.2.03.03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	(1) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah (2) Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK	(1) 4 dokumen (2) 4 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	82.520.000	10.000.000	12,12	10,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan sosial budaya, bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90%		116.141.641	2.175.000	1,87	8,75
5.01.03.2.01	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		39.999.289	2.175.000	5,44	13,75
5.01.03.2.01.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	4 laporan		4.999.900	-	0,00	20,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan	1 dokumen		14.999.775	-	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	4 laporan	1 laporan	4.999.954	2.175.000	43,50	35,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	1 laporan		14.999.660	-	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		38.755.096	-	0,00	2,50

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.03.2.02.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	5 laporan		4.999.846	-	0,00	5,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	1 laporan		14.999.432	-	0,00	5,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 laporan		3.764.611	-	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 laporan		14.991.207	-	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		37.387.256	-	0,00	10,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	5 laporan		9.900.988	-	0,00	10,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	1 laporan		10.050.988	-	0,00	10,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	5 laporan		3.565.140	-	0,00	10,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 laporan		13.870.140	-	0,00	10,00
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				135.905.488	-	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	75%		135.905.488	-	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%		40.586.701	-	0,00	0,00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	1 dokumen		40.586.701	-	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%		45.320.000	-	0,00	0,00
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian	1 dokumen		45.320.000	-	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%		49.998.787	-	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen	1 dokumen		49.998.787	-	0,00	0,00

Pelaihari, 6 Maret 2022
Kepala Bappeda

Andris Evony, S.STP,M.Si
NIP. 19790928 199711 1 001



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kabupaten Tanah Laut																						
Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							7,683,284,867	7,893,014,256	8,158,908,732						11,020,439,977		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	85 Nilai		0 Nilai	75 Nilai	75 Nilai	6,889,231,585	7,098,960,974	7,356,930,235						75 Nilai	9,056,252,783	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	9,999,501	9,999,501	9,999,501						100 %	30,000,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	4,999,501	4,999,501	4,999,501	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	6 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	5 Dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	%		%	100 %	100 %	5,738,496,897	5,809,154,465	5,810,154,465						100 %	6,695,151,709	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan				12 Bulan	12 Bulan	5,728,498,822	5,799,156,390	5,799,156,390	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	12 Bulan	6,680,151,709	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan				5 Dokumen	5 Dokumen	9,998,075	9,998,075	10,998,075	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	5 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000						100 %	75,000,000	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat				3 ASN	3 ASN	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	3 ASN	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	510,011,246	622,061,246	762,021,316						100 %	1,042,704,670	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik				11 Jenis	11 Jenis	9,655,959	9,655,959	9,655,959	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	11 Jenis	6,718,580	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				70 Jenis	71 Jenis	97,384,449	119,434,449	103,286,519	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	71 Jenis	56,198,890	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan				6 Jenis	6 Jenis	54,500,838	54,500,838	55,608,838	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	6 Jenis	32,898,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	3,480,000	3,480,000	3,480,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	1 Jenis	3,398,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Perjalanan Dinas Jumlah Rapat				100 Kali 200 Kali	561 Kali 200 Kali	334,990,000	434,990,000	589,990,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	561 Kali 200 Kali	918,490,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	39,496,524	66,524,698	158,519,086						100 %	111,346,840	
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya				4 Unit	9 Unit	39,496,524	66,524,698	158,519,086	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	9 Unit	111,346,840	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	471,277,417	471,277,417	469,277,417						100 %	413,512,208	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan				4 Jenis	3 Jenis	120,352,500	120,352,500	118,352,500	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	3 Jenis	218,887,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis alat kebersihan jumlah PTT yang dibayarkan honor nya				24 Jenis 14 Orang	24 Jenis 14 Orang	350,924,917	350,924,917	350,924,917	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	24 Jenis 14 Orang	194,624,808	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	104,950,000	104,943,647	131,958,450						100 %	688,537,356	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	12,000,000	11,998,152	14,048,716	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	1 Unit	55,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara				10 Unit 6 Unit	10 Unit 6 Unit	68,200,000	68,195,495	77,236,734	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	10 Unit 6 Unit	108,587,356	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara				5 Jenis	6 Jenis	24,750,000	24,750,000	40,673,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Tanah Laut	6 Jenis	24,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	80 %		0 %	85 %	85 %	677,911,641	677,911,641	650,126,753						85 %	1,336,286,362	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	%		%	100 %	100 %	495,391,641	495,391,641	476,606,753						100 %	950,577,536	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Jumlah Dokumen RKPD Perubahan				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	495,391,641	495,391,641	476,606,753	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	SKPD Se Kab. Tanah Laut	1 Dokumen 1 Dokumen	950,577,536	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000						100 %	129,725,200	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Dokumen	129,725,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	82,520,000	82,520,000	73,520,000						100 %	255,983,626	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK				4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	82,520,000	82,520,000	73,520,000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	SKPD Se Kab. Tanah Laut	4 Dokumen 4 Dokumen	255,983,626	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan sosial budaya	80 %		0 %	85 %	85 %	116,141,641	116,141,641	151,851,744						85 %	627,900,832	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	100 %	39,999,289	39,999,289	34,459,289						100 %	165,591,236	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	4,999,900	4,999,900	4,999,900	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	4 Laporan	41,366,156	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,775	14,999,775	7,439,775	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Dokumen	25,829,240	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia				4 Laporan	4 Laporan	4,999,954	4,999,954	4,999,954	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	4 Laporan	73,395,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia				1 Laporan	1 Laporan	14,999,660	14,999,660	17,019,660	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	24,999,940	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	100 %	38,755,096	38,755,096	80,373,231					100 %	211,964,230		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil FGD Analisa Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop				5 Laporan	1 Laporan 5 Laporan	4,999,846	4,999,846	52,711,600	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan 5 Laporan	49,999,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop				1 Laporan	1 Laporan	14,999,432	14,999,432	8,905,813	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	83,208,380	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				5 Laporan	5 Laporan	3,764,611	3,764,611	3,764,611	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	5 Laporan	49,021,810	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	14,991,207	14,991,207	14,991,207	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	29,734,240	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	100 %	37,387,256	37,387,256	37,019,224					100 %	250,345,366		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	9,900,988	9,900,988	1,999,472	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	SKPD Kab. Tanah Laut	5 Laporan	19,985,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	10,050,988	10,050,988	13,879,472	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	51,855,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah				5 Laporan	1 Laporan	3,565,140	3,565,140	16,390,140	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	28,744,180	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	13,870,140	13,870,140	4,750,140	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	149,760,786	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							284,983,662	135,905,488	15,010,000					700,000,000			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang di tindaklanjuti	80 %		0 %	75 %	75 %	284,983,662	135,905,488	15,010,000					75 %	700,000,000		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	%		%	100 %	100 %	224,990,000	45,320,000	15,010,000					100 %	225,000,000		
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	224,990,000	45,320,000	15,010,000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penguatan Reformasi Birokrasi	SKPD	1 Dokumen	225,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL												7,898,274,867	7,938,334,256	8,173,918,732					10,720,439,977			

KEPALA BAPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,

ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19790928 199711 1 001

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022
TRIWULAN II
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.098.960.974		1.228.199.768		2.233.924.457		-		-		3.462.124.225		48,77%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.999.501		1.125.000		1.389.000		-		-		2.514.000		25,14%
		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Dokumen)	6	4.999.501	2	1.125.000	1	234.000					3	1.359.000	50,00%	27,18%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun (Dokumen)	5	5.000.000	-	-	3	1.155.000					3	1.155.000	60,00%	23,10%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.809.154.465		1.037.677.137		1.807.270.857		-		-		2.844.947.994		48,97%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan (Bulan)	12	5.799.156.390	3	1.037.327.137	6	1.805.720.857					9	2.843.047.994	75,00%	49,03%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	5	9.998.075	1	350.000	2	1.550.000					3	1.900.000	60,00%	19,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000		-		600.000		-		-		600.000		4,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (ASN)	3	15.000.000	-	-	1	600.000					1	600.000	33,33%	4,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			622.061.246		66.539.378		255.286.387		-		-		321.825.765		51,74%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik (Jenis)	11	9.655.959	1	888.000	2	850.000					2	1.738.000	18,18%	18,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	70	119.434.449	10	17.803.100	46	21.880.000					46	39.683.100	65,71%	33,23%

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan (Jenis)	6	54.500.838	2	6.780.800	2	17.238.328					2	24.019.128	33,33%	44,07%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Jenis)	1	3.480.000	1	60.000	1	120.000					1	180.000	50,00%	5,17%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (Kali)	200	434.990.000	20	41.007.478	14	215.198.059					34	256.205.537	17,00%	58,90%	
			jumlah Perjalanan Dinas (Kali)	100		10		48					48	48,00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			66.524.698		-		41.700.000		-		-		41.700.000		62,68%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya (Unit)	4	66.524.698	-	-	2	41.700.000					2	41.700.000	50,00%	62,68%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			471.277.417		108.104.253		106.253.663		-		-		214.357.916		45,48%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan (Jenis)	4	120.352.500	3	21.296.214	1	18.871.993					4	40.168.207	100,00%	33,38%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PTT yang dibayarkan honor nya (Orang)	14	350.924.917	14	86.808.039	14	87.381.670					7	174.189.709	50,00%	49,64%	
			jumlah jenis alat kebersihan (Jenis)	24		5		18					23	95,83%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104.943.647		14.754.000		21.424.550		-		-		36.178.550		34,47%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (Unit)	1	11.998.152	1	1.840.000	1	3.763.750					1	5.603.750	50,00%	46,71%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara (Unit)	6	68.195.495	6	7.651.500	6	14.385.800					3	22.037.300	50,00%	32,31%	
			Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (Unit)	10		1		5					6	60,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (Jenis)	5	24.750.000	1	5.262.500	4	3.275.000					5	8.537.500	100,00%	34,49%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											71,63%	48,77%

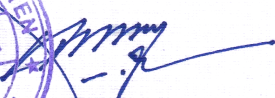
						Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah
		PERENCANAAN															
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			677.911.641		87.915.160		155.436.338		-		-		243.351.498		35,90%
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			495.391.641		77.915.160		56.791.338		-		-		134.706.498		27,19%
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	1	495.391.641	-	77.915.160	1	56.791.338					0	134.706.498	25,00%	27,19%
			Jumlah Dokumen RKPD Perubahan (Dokumen)	1		-		-					-	0,00%			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100.000.000		-		98.645.000		-		-		98.645.000		98,65%
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja (Dokumen)	1	100.000.000	-	-	1	98.645.000					1	98.645.000	100,00%	98,65%
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			82.520.000		10.000.000		-		-		-		10.000.000		12,12%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK (Dokumen)	4	82.520.000	1	10.000.000	-	-					1	10.000.000	25,00%	12,12%
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah (Dokumen)	4		1		-				1	25,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					26,93%	35,90%	
										Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			116.141.641		2.175.000		6.168.000		-		-		8.343.000		7,18%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			39.999.289		2.175.000		3.048.000		-		-		5.223.000		13,06%

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan (Laporan)	4	4.999.900	-	-	1	349.800					1	349.800	25,00%	7,00%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan (Dokumen)	1	14.999.775	-	-	-	378.600					-	378.600	0,00%	2,52%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia (Dokumen)	4	4.999.954	1	2.175.000	-	1.032.300					1	3.207.300	25,00%	64,15%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia (Laporan)	1	14.999.660	-	-	-	1.287.300					-	1.287.300	0,00%	8,58%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			38.755.096		-		1.920.000			-	-		1.920.000		4,95%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop (dokumen)	5	4.999.846	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop (Laporan)	1	14.999.432	-	-	-	1.920.000					-	1.920.000	0,00%	12,80%

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitas Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	5	3.764.611	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	14.991.207	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			37.387.256		-		1.200.000		-		-		1.200.000		3,21%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur (laporan)	5	9.900.988	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur (laporan)	1	10.050.988	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah (laporan)	5	3.565.140	-	-	-	1.200.000					-	1.200.000	0,00%	33,66%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah (laporan)	1	13.870.140	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											2,15%	7,18%
						Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																

		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			135.905.488		-		2.610.200		-		-		2.610.200		1,92%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			40.586.701		-		-		-		-		-		0,00%	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	40.586.701	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			45.320.000		-		2.610.200		-		-		2.610.200		5,76%	
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian (Dokumen)	1	45.320.000	-	-	-	2.610.200					-	2.610.200	0,00%	5,76%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			49.998.787		-		-		-		-		-		0,00%	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	49.998.787	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0,00%	1,92%
						Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
				8.028.919.744	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											65,64%	46,29%	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sedang	Sangat Rendah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,

Andris Evony, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19790928 199711 1 001